

**Pelaksanaan Asas Peradilan Sedehana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih
Siyasah
(Study Pengadilan Agama Kalianda)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Anton Kurnia Mardiansyah

NPM. 1421020052

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi, M. Sos. I.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M. Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Peradilan Agama keberadaannya telah ada jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Di dalam Sejarah Peradaban Islam Peradilan sudah ada sejak kekhalifahan Rasulullah SAW. yang kemudian dilanjutkan serta dikembangkan lagi pada masa Khulafur Rasydin, bani Abbasiyyah, bani Umayyah hingga sampai sekarang ini. Pengadilan Agama Kalianda dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan Hukum dan keadilan harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi pada prakteknya Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tentu berjalan dengan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak dan sebagainya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Kalianda Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Kalianda?

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara. Data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Kalianda. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda sebenarnya telah sesuai dengan asas tersebut karena Pengadilan Agama Kalianda sudah bekerja dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Indonesia, Namun tetap saja masih sedikit terjadi kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda disebabkan dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ada pula faktor lain seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan contohnya seperti, serta faktor non-teknis lainnya. Mengenai asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan fiqh siyasah ajaran Islam berdasarkan dalil *Maslahah Mursalah* yaitu sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode instinbat hukum, menjadikan hukum islam itu luwes, dan keuniversalan hukum islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Itu semua bertujuan untuk Kemaslahatan Ummat semata, karena apabila asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dengan baik, tentulah masyarakat pencari keadilan akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Anton Kurnia Mardiansyah

NPM : 1421020052

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Dr. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN MENURUT UU NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN FIQIH SIYASAH (Studi Pengadilan Agama Kalianda)”** disusun oleh: **Anton Kurnia Mardiansyah, NPM. 1421020052,** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah),** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa, 17 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S. Ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.

(.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji II : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

(.....)

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”. (Q. S. Shaad: 26).¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 453

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis pribadi guna menjadi manusia yang lebih baik, diantaranya:

1. Kedua Orangtuaku Bapak Sartono dan Ibu Marjiah yang senantiasa penulis cintai dan banggakan yang selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberikan motivasi baik moril maupun materiil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak kedepannya.
2. Untuk Saudara laki-laki penulis Bagus Attaqwa Apriansyah yang selalu jadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi panutan selaku kakak tertua dan satu-satunya sertamenjadi kebangganKeluarga Besar penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Anton Kurnia Mardiansyah. Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 22 Juni 1996, anak pertama dari 2 (dua) bersaudara Bagus Attqwa Apriansyah, putra dari pasangan Bapak Sartono dan Ibu Marjiah.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu:

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMA) di SMA Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif di Organisasi:
 - a. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) sebagai Anggota Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Asas Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009	
1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	15
2. Pengertian Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	20
3. Dasar hukum	28
B. Peradilan Menurut Fiqih Siyasah	
1. Sejarah Peradilan Islam.....	29
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Fiqih Siyasah.....	40
3. Dasar Hukum	42
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KALIANDA	
A. Sejarah Pengadilan Agama Kalianda	44
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda.....	46
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda	49
D. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda.....	49
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda	52
F. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Kalianda	
1. Faktor Pendorong.....	61
2. Faktor Penghambat	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Kalianda67
- B. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan75
- B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)". Judul tersebut terdiri dari istilah pokok yaitu, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹
2. Asas Sederhana yang dimaksud dengan sederhana yaitu Sederhana mengacu pada rumit tidaknya penyelesaian perkara.²
3. Asas Cepat yang dimaksud dengancepat artinya bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.³
4. Asas Biaya Ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992), h. 426.

³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 53.

dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.⁴

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵
6. Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamankan oleh umat Islam.⁶
7. Siyasah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.⁷
8. Pengadilan Agama Kalianda adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Kalianda.⁸

Dari uraian istilah judul yang telah dikemukakan diatas maka yang dimaksud judul skripsi "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)" adalah suatu kajian mengenai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang No 50 Tahun 2009 dan Fiqh Siyasah di Pengadilan Agama Kalianda.

⁴ Rimdan, *kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 54

⁵Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 3.

⁷*Ibid*, h. 5.

⁸ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Untuk mengetahui pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda apakah sudah terlaksana atau tidak dan apa saja yang menjadi faktor pendorong serta kendala dalam proses pelaksanaan asas tersebut dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah

2. Secara Subjektif

Pembahasan ini diangkat dikarenakan sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

C. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama keberadaannya telah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ia telah mengalami pasang surut baik dari segi penanaman, status kedudukan, maupun kewenangannya.⁹ Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Al-qur'an, Hadis Rasul dan

⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), H. 13

Ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materiil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia.

Al-qadh (pengadilan) bertujuan untuk memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa. Dengan adanya pengadilan, hukum syara' menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial.

Dalil pensyariat atau peradilan (qodhi) adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Ijma' dimulai sejak masa sahabat, Tabiin, sampai para ulama sesudahnya. Hukumnya telah disepakati pula yaitu, fardhu kifayat.

Dengan melihat pentingnya suatu lembaga peradilan maka dalam surat Shaad ayat 26 Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُۢسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shaad: 26).¹⁰

Suatu contoh bahwa Peradilan Agama sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia adalah di Kerajaan Mataram kurang lebih tahun 1610-

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), h. 736.

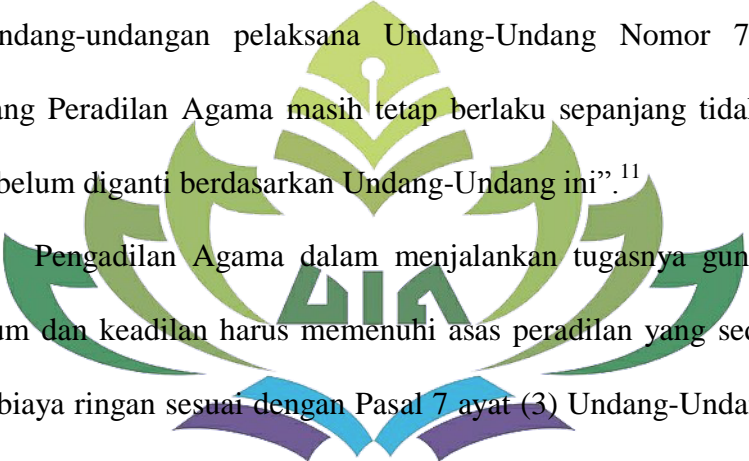
1645 dikenal peradilah serambi, karena tempat mengadili di adakan di serambi masjid, dan hakim-hakimnya diangkat oleh sultan. Pengakuan berlakunya hukum Islam yang telah ada sejak lama diwilayah Nusantara ini pada masa yang lalu tercermin dalam kegiatan peradilan di beberapa Kerajaan/Kesultanan.

Setelah Indonesia merdeka dalam UUD 1945 keberadaan Peradilan Agama diakui dan termasuk kedalam lingkungan badan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24, namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama.

Setelah 17 tahun diberlakukannya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagai salah satu payung hukum keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang selalu berkembang maka diadakanlah perubahan atas undang-undang tersebut pada tahun 2006 dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kemudian setelah 3 tahun undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dilakukan pula perubahan kedua dengan undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Sederetan perubahan atas undang-undang Peradilan Agama membawa sesuatu hal yang baru bagi tumbuh kembangnya Peradilan Agama di Indonesia.

Meskipun Undang-undang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetap berlaku selama belum dirubah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.¹¹



Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan “cepat” adalah proses penyelesaian perkara tidak terlalu lama. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dapat terikul oleh rakyat.¹² Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.

¹¹UU PA, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2004), h. 13

¹²Penjelasan pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama Kalianda dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya, mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak pengadilan agama sendiri.

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan sederhana dan penyelesaian perkara yang terlalu lama tidak memenuhi asas peradilan yang cepat.

Peradilan Agama harus mempedomani asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terutama para Hakim dalam menjalankan tugasnya melayani pencari keadilan. Tidaklah sempurna tercapainya keadilan bagi para pencari keadilan apabila aparatur Pengadilan tidak lagi berpedoman kepada Undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu, tegakkanlah hukum materiil dan hukum formil khususnya mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jelas Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan berpegang pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as, pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, dimana Nabi Adam as, yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikenal dengan peradilan seperti dikenal sekarang,

karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangnya.¹³

Hakim pertama sekali yang disebut dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud as, dan Nabi Sulaiman as. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka.¹⁴

Bagi masyarakat Arab pada zaman jahiliah pra Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Mereka pada umumnya berpegang pada tradisi (kebiasaan) dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah (suku) untuk menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.¹⁵

Namun seiring berjalannya waktu sistem peradilan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu antara lain:

1. Peradilan masa Rasulullah SAW;
2. Peradilan masa Khalifah Abu bakar;
3. Peradilan masa Khalifah Ustman bin Affan;
4. Peradilan masa Khalifah Umar bin Khattab;
5. Peradilan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib;
6. Peradilan masa Dinasti Bani Abbasiyah;
7. Peradilan masa Dinasti Bani Umayyiah.

¹³Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012) , h. 17.

¹⁴*Ibid*, h .17.

¹⁵*Ibid*, h. 29

Para ulama mengartikan siyasah dalam arti yang sangat luas yang pada prinsipnya mengendalikan atau mengurus kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat.

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dilihat dari pendekatan siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan) yang sesuai dengan penjelasan fiqh siyasah diatas. Karena asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diformulasikan dalam Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yakni DPR, dan pelaksanaan asas tersebut harus dijalankan oleh lembaga peradilan yang berada di Indonesia termasuk Peradilan Agama.

Dengan permasalahan diatas masih banyak masyarakat yang enggan menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama Kalianda. Tentu hal ini terjadi disebabkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, terkadang bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda. Untuk itulah penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)”

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Kalianda?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Kalianda?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya kegiatan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Kalianda.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Siyasah tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari diadakannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk memperkaya khazanah pemahaman keislaman dan memberikan masukan penelitian dibidang ilmu hukum.

- b. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat dan pihak-pihak yang dalam lingkungan Peradilan Agama yang belum mengetahui tentang bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kalianda.

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya melukiskan variabel demi variabel, atau satu demi satu secara sistematis. Selain daripada itu skripsi ini juga bersifat analisis, artinya mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui selisihnya.¹⁶

Yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kalianda.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer, yaitu berupa data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari Responden.¹⁷ Yang menjadi tempat penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Kalianda.

¹⁶ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 19.

¹⁷ Zeni Yusrli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 6

b. Sumber Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mendukung data primeryang bersumber dari Undang-Undang, buku Fiqih, Al-Qur'an dan Hadis, serta Jurnal dari catatan atau laporan historis.¹⁸ Data yang penulis peroleh yaitu dari penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kalianda.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data lapangan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Penulis melakukan observasi di Pengadilan Agama Kalianda.
- b. Interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan

¹⁸*Ibid*, h. 7

dengan Narasumber yaitu, Hakim, Panitera, Pihak yang berperkara, Saksi-saksi yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Kalianda.

- c. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yang berlokasi di Pengadilan Agama Kalianda.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data yang sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi lapangan dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dan penelaahan data. Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

5. Metode Analisa Data

Penulisan menggunakan metode analisa induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.¹⁹ Penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan

¹⁹Zeni Yusarlis, Op.Cit, hlm. 10

data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²⁰ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²¹ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Selain itu penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (cetakan ke-1), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama

1. Sejarah Peradilan Agama

Peradilan Agama keberadaannya telah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ia telah mengalami pasang surut baik dari segi penerimaan, Status dan kedudukan, maupun kewenangannya.²² Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Salah satu contoh bahwa Peradilan Agama telah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia adalah di Kerajaan Mataram kurang lebih tahun 1610-1645 dikenal dengan Pengadilan Serambi, karena tempat mengadili diadakan di Serambi Masjid, dan hakim-hakimnya diangkat oleh Sultan. Pengakuan berlakunya Hukum Islam yang telah ada sejak lama di Wilayah Nusantara ini pada masa lalu yang tercermin dalam beberapa Peradilan di beberapa Kerajaan/Kesultanan.²³

Ketika pemerintah Belanda menjajah kepulauan Nusantara (Indonesia), pengakuan dan perlakuan mengenai kedudukan dan

²²Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 13.

²³*Ibid*, h. 15

kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam berbagai peraturan, sehingga terdapat keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai badan Peradilan Agama di Indonesia. Di Jawa dan Madura digunakan istilah Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Islam Tinggi, di Kalimantan Selatan dan Timur digunakan istilah Kerapatan Qadi, dan Pengadilan Qadi Tinggi (Kerapatan Qadi Besar), diluar Jawa lainnya, di Aceh: Mahkamah Syari'ah, di Palembang: Qadi Syura, di Makassar: Syara Tanette, di Bima: Badan Hukum Syara'.²⁴

Pada masa penjajahan Jepang, Intervensi Kolonial Jepang terhadap Pengadilan Agama sangat rendah sehingga memungkinkan adanya usaha untuk memulihkan Peradilan Agama, khususnya mengenai perwakafan dan kewarisan. Namun, usaha yang dilakukan oleh golongan Islam mengalami kegagalan karena ditentang oleh golongan Nasionalis. Golongan Islam yang dipelopori oleh Abikusno berpandangan bahwa peradilan agama harus tetap ada dan kewenangannya harus segera dipulihkan. Sementara itu, golongan Nasionalis yang diwakili oleh Supomo menghendaki adanya Negara Sekuler, tidak perlu berdasarkan Islam, dan Peradilan Agama hendaknya dihapuskan.

Menjelang pada saat Kemerdekaan, terjadi perdebatan antara golongan Islam dan golongan Nasionalis yang menjurus pada konflik dalam merumuskan dasar Negara. Pada tahap awal, para pemimpin Islam berhasil memulihkan dan menegakkan hukum Islam di Indonesia dengan

²⁴*Ibid*, h. 17.

disepakatinya piagam Jakarta 22 juni 1945 yang berbunyi "Negara berdasarkan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya". Piagam Jakarta merupakan usaha untuk memperjelas srtuktur Negara Islam pada masa mendatang. Akan tetapi, atas desakan hukum Nasionalis, terutama umat Kristiani, ketujuh kata tersebut dibuang dari pembukaan UUD 1945 dan diubah menjadi "Yang Maha Esa". Perdebatan tersebut terus berlangsung baik ditengah masyarakat maupun dalam sidang konstituante.

Setelah Indonesia merdeka dalam UUD 1945 keberadaan Peradilan Agama diakui dan termasuk dalam badan lingkungan badan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, namun belum ada Undang-Undang mengenai Peradilan Agama. Sedangkan, mengenai hukumnya, hukum material Islam diakui dalam pasal 29 UUD 1945.

Bangsa Indonesia menghendaki Peradilan Agama yang berdiri sendiri, sesuai pasal 24 dan 25 UUD 1945. Pada tahun 1946 berdasarkan penetapan pemerintah Nomor 5/SD/1946, pembinaan Peradilan Agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementrian Agama. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang telah keluarnya PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan.²⁵

²⁵*Ibid*, h. 21.

Usaha mempersiapkan RUU PA telah dimulai oleh Departemen Agama sejak tahun 1961, yaitu sejak dibentuk panitia dengan keputusan Menteri Agama Nomor 66 tahun 1961. Masa 28 tahun pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (1961s/d1989) merupakan kegiatan mempersiapkan RUU dan tahap kedua, yakni satu (1) tahun pembahasan di DPR/XII/1989 tanggal 3 Desember 1988 dibicarakan di DPR sampai disetujui dalam sidang pleno DPR RI tanggal 14 Desember 1989.

Setelah 17 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai salah satu payung hukum keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang selalu berkembang maka di adakanlah perubahan atas Undang-undang tersebut pada tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Kemudian setelah 3 tahun Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan, maka dilakukan pula perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sederetan perubahan atas Undang-undang Peradilan Agama membawa sesuatu hal yang baru bagi tumbuh kembangnya Peradilan Agama di Indonesia.

Tujuan dilakukannya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama sebagaimana termaktub dalam risalah Undang-Undang, antara lain:

- a) Untuk menyesuaikan dan menyelaraskan aturan-aturan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan hakim di lingkungan badan Peradilan Agama.
- b) Agar Peradilan Agama dapat menjadi salah satu badan peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan, khususnya di kalangan yang beragama Islam, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c) Agar para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat berkerja dengan baik serta profesional dan senantiasa berlandaskan pada asas peradilan serta pengawasan melekat, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ia menjadi bagian dan tanggung jawab Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Sedangkan secara eksternal, ia senantiasa diawasi oleh masyarakat selaku pencari keadilan.²⁶

Dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang dimana saat ini dirubah menjadi Undang-

²⁶*Ibid*, h. 30

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, Namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) nya masih beragam dan hukum acara yang digunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam. Mengenai hukum material sesuai dengan wewenang Peradilan Agama yang pada hakekatnya menyelesaikan persoalan-persoalan dan perkara yang berkenaan dengan perkawinan, kewarisan, dan wakaf berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an, Sunnah, serta Ijtihad yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semuanya diperlukan tatanan etika, atau perilaku moral menjadikan hukum-hukum agama sebagai sumber penetapan sanksi moral.²⁷

2. Pengertian Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Meskipun Undang-Undang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetap berlaku selama belum dirubah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa “pada saat Undang-Undang

²⁷ Philip K. Hitty, *History Of The Arabs: From The Earlist Time to The Present*, (New York: Polgrave Macmilan: 2002), h. 501.

ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.²⁸

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan “cepat” adalah proses penyelesaian perkara tidak terlalu lama. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dapat terpikul oleh rakyat.²⁹

a. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)).³⁰ Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).³¹

²⁸UU PA, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2004), h. 13

²⁹Penjelasan pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 36.

³¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 163

Sederhana mengacu pada rumit tidaknya penyelesaian perkara.³² Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.³³

Sedangkan pada bagian lainnya Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, Sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara dipengadilan, makin baik.³⁴

Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalanya persidangan mundur terus, untuk sekian puluh kali untuk alasan yang tidak sah menurut hakim.

³²Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 1992), h. 426.

³³ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 64.

³⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi keempat). (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 27.

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk-beluknya.³⁵ Cepat artinya bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.³⁶

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai perkara diminutasi.³⁷ Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 5 bulan.

Yang dimaksud dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu 1 jam atau 2 jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relativ tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Jadi, yang dituntut oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga

³⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, h. 792.

³⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 53.

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga dapat memakan waktu lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan secara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.³⁸

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum untuk apa proses pemeriksaan yang cepat kalau hukum yang ditegakkan didalamnya berisikan kepalsuan terhadap kebenaran dan keadilan.

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketepatan keputusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut berperan mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang didalam putusan. Apalagi hal itu dibarengi dengan

³⁸ Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32.

pelayanan pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Operasional Pegawai (SOP) yang telah ditentukan, maka akan semakin tinggi pula derajat nilai kebenaran dan keadilan itu.

c. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan.³⁹ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.⁴⁰

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat telah didaftarkan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera

³⁹ Rimdan, *Op. Cit*, h. 54.

⁴⁰ A Mukti Arto, *Op. Cit*, h. 67.

sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.⁴¹

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut:

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir.
- 2) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- 3) Biaya perkara penetapan atau putusan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.⁴²

Di dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga disebutkan dalam pasal 1, yakni:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;

⁴¹Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 43.

⁴²Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- 3) Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
- 4) Biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

Dalam pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud “sederhana” dan “cepat” adalah terkait dengan keefisienan (berorientasi pada waktu dan sumberdaya) dan keefektifan (berorientasi pada hasil) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan. Jadi, ketika pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat dan dengan disertai hasil pemeriksaan (putusan) yang berkualitas, ini merupakan penerapan dari asas sederhana dan cepat.

Sedangkan yang dimaksud biaya ringan adalah bahwa biaya perkara yang harus dibayarkan di Pengadilan harus dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Dan bagi mereka yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo. Namun perlu digaris bawahi bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya tidak mengesampingkan ketelitian, dan kecermatan dalam mencari keadilan.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitanya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegak hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan menyesuaikan predikat keagamaan yang mereka sandang.⁴³

3. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dasar Hukum asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3 yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁴⁴

⁴³ M Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 72

⁴⁴ Penjelasan Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Peradilan Menurut Fiqih Siyasah

1. Sejarah Peradilan Islam

Sebenarnya Peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as, pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, dimana Nabi Adam as, yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikenal dengan peradilan seperti dikenal sekarang, karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangnya.⁴⁵

Hakim pertama sekali yang disebut dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud as, dan Nabi Sulaiman as. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka.⁴⁶

Bagi masyarakat Arab pada zaman Jahiliah pra Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Mereka pada umumnya berpegang pada tradisi (kebiasaan) dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah (suku) untuk menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.⁴⁷ Namun seiring berjalanya waktu sistem peradilan islam terus berkembang dari waktu ke waktu dimulai dari zaman Rasulullah Saw., Khulafa Al- Rasyidin, dan Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah.

⁴⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012) , h. 17.

⁴⁶ *Ibid*, h .17.

⁴⁷ *Ibid*, h. 29

a) Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw.

Setelah Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk makkah, terutama masalah akidah selama 13 tahun. Kondisi Islam masih lemah, baik dari segi kuantitas ataupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan. Kemudian Allah Swt. Memerintahkan Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya.

Berbeda dengan di Makkah, kondisi di Madinah relatif stabil dan jumlah umat islam semakin banyak, sementara Rasulullah Saw. dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat islam maupun non-muslim, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah. Permasalahan semakin bertambah di masyarakat terutama masalah muamalah, dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa dihadapkan kepada Rasulullah Saw. dan beliau menyelesaikan permasalahan berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah Swt. Kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”* (Q.S Al-Maidah: 49).⁴⁸

Orang yang pertama kali menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah Saw.sendiri berdasarkan perintah Allah Swt. dalam firman diatas, agar beliau memutuskan antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah Swt. dalam Al-Quran dengan adil. Seperti halnya perjanjian yang dibuat Rasulullah Saw.antara kaum muslimin dengan agama dan suku yang lain: *“bahwa apa yang terjadi diantara mereka baik peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya maka penyelesaiannya adalah kepada Allah dan Rasulullah Saw“*. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah Saw.dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi diantara penduduk Madinah. Sehingga beliau menjadi satu-satunya hakim dalam setiap perselisihan dan perkara.⁴⁹ Allah Swt. menjelaskan dalam Al-Quran bahwa diantara fondasi keimanan seseorang adalah menjadikan Rasulullah Saw. sebagai hakim terhadap peristiwa yang diperselisihkan.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), h. 168.

⁴⁹ Alaidin Kotto, *Op. Cit*, h. 39.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.S. Annisa:65).

Dikota Madinah Rasulullah Saw. menjadi hakim satu-satunya, namun ketika wilayah Islam meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubernur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai hakim. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah.⁵⁰

Hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh hakim daerah, disampaikan kepada Rasulullah Saw. maka Rasulullah membenarkan putusan-putusan hakim daerah itu atau membatalkannya.

Para hakim di zaman Rasulullah Saw. telah ditetapkan gaji yang disesuaikan dengan masa dan kebutuhan mereka. Attab pernah mengatakan, bahwa Rasulullah Saw. telah memberikan untuk tiap hari 2 (dua) dirham. Maka perut yang tidak bisa kenyang dengan 2 (dua) dirham, adalah perut yang tidak kenyang-kenyang.⁵¹

⁵⁰TM.Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

⁵¹*Ibid*, h. 11.

b) Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, sahabat, sebagai generasi islam pertama, meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Abu bakar adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pemimpin umat islam. Abu bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, setelah itu Umar bin Khattab digantikan oleh Usman bin Affan, dan Usman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Empat pemimpin umat tersebut dikenal sebagai *Khulafa Al-Rasyidin* (para pemimpin yang diridhai).

1) Peradilan pada masa Abu Bakar

Diriwayatkan, bahwa pada masa Abu bakar, urusan peradilan diserahkan pada Umar bin Khattab selama dua tahun lamanya. Maka tercatatlah dalam sejarah orang yang pertama kali menjadi qadhi dalam islam pada masa awal khalifah al-Rasyidin adalah Umar bin Khattab. Selama dua tahun, hanya terdapat dua orang yang saling berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau terkenal ketegasan yang dimilikinya. Selain itu, Abu bakar juga mengutus Anas sebagai hakim ke Bahrain.

2) Peradilan pada masa Umar bin Khattab.

Setelah Abu bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab menggantikannya sebagai khalifah ke-2. Pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun. Umar bin Khattab

memisahkan peradilan (yudikatif) dari pemerintahan (eksekutif), dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para Gubernur.

Para hakim pada masa Umar merujuk pada Al-Qur'an jika tidak mendapati hukum dalam Al-Qur'an mencarinya dalam Sunnah. Tapi jika mereka tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya, mereka bertanya pada fuqaha mujtahidin, apakah diantara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam Sunnah mengenai perkara yang dihadapi. Jika didapatkan, mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar jamaah, dan berijtihad secara individu dalam masalah-masalah sektoral yang khusus dengan individu.⁵²

3) Peradilan pada masa Usman bin Affan

Usman bin Affan adalah orang pertama yang mengkhususkan kantor untuk peradilan, sedangkan peradilan dalam masa dua khalifah sebelumnya dilaksanakan di masjid. Peradilan pada masa Usman sama seperti peradilan di masa sahabat sesudahnya. Usman mengutus petugas-petugas sebagai pengambil pajak dan terhadap masyarakat yang bukan muslim

⁵² Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 303.

berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka.

4) Peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memerintah dari tahun 656-662 M. Sejak kecil ia di didik dan diasuh oleh Nabi Muhammad Saw. Ali seringkali ditunjuk oleh Nabi menyelesaikan masalah-masalah penting. Semasa pemerintahannya Ali tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan hukum Islam, karena keadaan Negara idak stabil. Disana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam. Nabi Muhammad Saw. telah bersaksi bahwa peradilan sebagaimana yang diputuskan Ali, atau umatku yang terbaik peradilannya adalah Ali, atau yang terbaik peradilannya diantara kamu adalah Ali.⁵³

Ali menetapkan hukum diantara manusia selama di Madinah. Ketika keluar Bashrah dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abu Aswad Al-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Bashrah dan sekaligus dalam peradilan. Namun, kemudian dia dipecat setelah beberapa waktu karena banyaknya dia berbicara sebab bicaranya melebihi pembicaraan dua pihak yang berseteru (penggugat dan tergugat). Ali mengangkat Al-Nakha'i sebagai Gubernur di

⁵³ Alaidin Kotto, *Op. Cit*, h. 71.

Ustur. Ali berpesan agar Al-Nakha'i bertakwa kepada Allah Swt. agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan kepada rakyat, dan agar bermusyawarah dan memilih penasihat-penasihat. Ali berkata (memesan) tentang khusus urusan *qadhi*: “diantara rakyatmu yang engkau pandang mampu yang tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain dan anjurkanlah agar mereka bersabar dalam berusaha mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya”.⁵⁴

c) Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

Setelah masa Khalifah Al-Rasyidin berakhir, fase selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Bani Umayyah. Dengan khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sofyan, dinasti ini beribukota di Damaskus. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun.

Pada masa Dinasti Umayyah, *al-qadha* dikenal dengan al-Nizham *Al-Qadha'iy* (organisasi kehakiman), dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Dinasti Umayyah, yaitu:

- 1) Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma. Ketika itu Mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah.

⁵⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), cet. IV, h. 42.

- 2) Lembaga Peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otoritas yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku kepada rakyat biasa, tetapi juga kepada penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan.⁵⁵

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu:

Pertama, al-Qadhaa merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu, badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang cacat mental.

Kedua, al-Hisbah merupakan tugas *al-muhtasib* (kepala hisbah). Dalam hal menyelesaikan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Menurut *Al-Syaqathi* dalam bukunya *Fi Adaab al-Hisbah*, seperti yang dikutip oleh Philip K. Hitty bahwa tugas *al-Muhtasib* selain mengarahkan polisi juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dari timbangan serta ikut mengurus kasus-kasus perjudian, seksa amoral, dan busana yang tidak layak di depan umum.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit*, h. 20.

⁵⁶ Alaidin Kotto, *Op. cit*, h. 83.

Ketiga, al-Nadhar fi al-Mazhalim. Merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya (*al-Qadhaa dan al-Hisbah*). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar agama yang berbuat salah.

d) Peradilan pada masa Bani Abbasiyah.

Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Dinasti Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri Dinasti ini adalah keturunan al-Abbas paman Nabi Muhammad Saw. dan kekuasaan Bani Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari 132 H/750 M sampai 656 H/ 1258 M.⁵⁷

Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya yakni masa kekuasaan Umayyah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan daerah di berbagai tempat.

Perkembangan kekuasaan kehakiman pada masa Abbasiyah mengalami kemajuan. Tidak hanya pembenahan terhadap sarana peradilan, tetapi sudah mukai disusun hukum materiil yang akan digunakan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusannya.

Jika pada masa Khulafa Al-Rasyidin dan Umayyah kahlifah memegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, maka pada masa ini

⁵⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.

khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara di Pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, para hakim ditunjuk oleh khalifah-lah yang akan mengusut perkara tersebut.

Perubahan lain yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah adalah para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab. Dengan demikian, syarat hakim untuk mujtahid sudah ditiadakan. Kemudian, organisasi-organisasi kehakiman mulai mengalami perubahan, antara lain telah diadakan jabatan-jabatan penuntut umum (kejaksaan) disamping telah dibentuk instansi *diwan qadhi-alqudhah*, sebagai berikut:

- 1) *Diwan Qadhi al-Qudhah* (fungsi dan tugasnya mirip dengan departemen kehakiman) yang dipimpin oleh *qadhi al-qudhah* (ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan yang ada hubungannya dengan kehakiman berada di bawah diwan qadhi al-qudhah
- 2) *Qudhah al-Aqali* (hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi)
- 3) *Qudhah al-Amsaar* (hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri).

- 4) *Al-Sulthah al-Qadhaiyah*, yaitu jabatan kejaksaan di ibukota Negara dipimpin oleh *al-Mudda'il Ummy* (Jaksa Agung) dan tiap-tiap kota oleh *Naim Ummy* (Jaksa).⁵⁸

Jika pada masa Nabi perkara itu dengan mudah bisa diputuskan oleh beliau karena memang sumber hukum berasal dari diri beliau, baik Al-Quran maupun Hadis, maka pada masa Dinasti Abbasiyah sumber hukum lebih bervariasi. Disamping Al-Quran dan Hadis, sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim kala itu adalah yurisprudensi atau preseden hukum yang ditinggalkan oleh hakim-hakim sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri sebelum ini, hakim-hakim Umayyah telah memutuskan berbagai persoalan baik yang ada ketentuannya dalam nash maupun belum. Keputusan-keputusan itu merupakan warisan yang kaya dan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi hakim-hakim masa Dinasti Abbasiyah.⁵⁹

2. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Fiqih Siyasah

Secara terminologi dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa pada kemaslahatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu, politik dalam negeri dan luar negeri serta

⁵⁸A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet. Ke-5, h. 234-235.

⁵⁹Alaiddin Kotto, *Op. Cit*, h. 125.

kemasyarakatan yakni, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.⁶⁰

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat dari pendekatan siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan). Walaupun didalam Al-Qur'an sendiri tidak disinggung secara jelas mengenai asas peradilan ini, Namun hal tersebut dapat di akomodir dan di dukung oleh dalil *Maslahah Mursalah* yaitu, Kemaslahatan yang belum tertulis dalam Nas dan Ijma' serta tidak ditemukannya Nas dan Ijma' yang melarangnya.

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Chalid Al-Djahanni bahwasanya keduanya berkata: “Sesungguhnya anak laki-laki telah berbuat jahat kepada orang ini, dengan menzinai Isterinya, dan bahwasanya saya diberi khamar bahwa saya terhadap anak laki-laki saya dihukum rajam. Maka saya telah mengganti rugi kepadanya dengan seratus biri-biri dan seorang budak perempuan (Walidah)”, maka Rasulullah SAW berkata: “maka saya akan bersungguh-sungguh kepada kamu berdua dengan kitab Allah SWT, budak perempuan dan biri-biri itu kembalikan, dan terhadap anak laki-laki anda seratus kali dera dan dibuang setahun”. Dan pergilah pagi-pagi kepadanya perempuan orang ini, apabila ia mengakui maka rajamlah dia. Maka berkata ia mengakui dan oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan dan ia pun dirajam.⁶¹

⁶⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prenada, 1997), h. 23.

⁶¹ Halman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1971), h. 386.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a bahwasanya ada seseorang yang ditangkap karena ia kedapatan telah mencuri. Dalam kasus ini seorang pencuri ini telah mencapai Nisob. Umar bin Khattab r.a segera menyelesaikan perkara ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada masa itu tanpa harus potong tangan pencuri tersebut tetapi, melainkan hanya diganti dengan memenjarakannya.

Dalam perkara yang diselesaikan Ali bin Abi Thalib r.a yakni tentang kasus baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a intinya kasus ini tentang hilangnya baju besi milik Ali dari Untanya. Kemudian dalam perjalanan Ali bin Abi Thalib r.a melihat bahwasnya baju besi miliknya berada ditangan orang Yahudi. Dalam perkara tersebut Ali langsung menyelesaikan perkara tersebut pada waktu itu juga. Walaupun pada akhirnya baju besi tersebut dihibahkan kepada orang Yahudi tersebut⁶².

3. Dasar Hukum

Dalam logika Agama, dasar aturan hukum dan moral selain Tuhan adalah bentuk pengingkaran. Itulah sebabnya kaum fundamentalis (pemahaman barat) kekuasaan dan kedaulatan Tuhan berarti Tuhan merupakan satu-satunya pembuat hukum.⁶³

Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah Swt. surat Shaad (38) ayat 26, yaitu:

⁶² Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 141.

⁶³ Khalid Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* terj. Gita Ayu Rahmani dan Ruslani, (Jakarta: Ufuk, 2004), h. 18.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan“. (Q.S Shaad: 26).⁶⁴

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah (5) ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik“. (Q.S Al-Maidah: 49).⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 736.

⁶⁵ *Ibid*, h. 168.

BAB III

GAMBARAN UMUM PA KALIANDA

A. Sejarah Pengadilan Agama Kalianda

Sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perjaranya ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Maka sejak diresmikan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor: 95 dan 96 Tahun 1982. Tentang pembentukan beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Kalianda yang kegiatan operasionalnya baru dimulai pada bulan Oktober 1983 dengan kantormenyewa rumah penduduk di daerah perempatan jalan Kalianda bawah. Pengadilan kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah personil 8 (delapan) orang. Dan yang menjabat sebagai Ketua adalah Abdullah Dhia, S.H. dan Husni Lukman sebagai panitera kepala, dan 6 (enam) tenaga Administrasi serta dibantu 3 (tiga) hakim honor.

Pada Tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapat tanah berukuran: 2.960 M² dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M² yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. Roihan A. Rasyid, Bc. Hk. Yang membawahi wilayah Pengadilan Agama se-Sumatera bagian Selatan (Palembang, Bengkulu, dan Lampung), berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 26 Tahun 1983 yang di sempurnakan dengan Keputusan Menteri

Agama RI. Nomor: 42 Tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda dikategorikan sebagai Pengadilan Agama kelas II A.

Dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda yang sangat luas, maka dipandang perlu melaksanakan siding keliling untuk beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat (yang sekarang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian wilayah Pengadilan Agama Tanggamus) untuk sidang keliling yang wilayahnya ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gedong Tataan, sedangkan sidang keliling kecamatan Talang Padang menumpang di Balai Sidang keliling Pengadilan Agama Kalianda.

Kemudian Tahun 1986 mendapatkan anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M² dan dibangunlah Gedung balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M² yang diresmikan pemakaiannya oleh Abdullah Dhia, S. H. (sebagai ketua Pengadilan Agama Kalianda). Pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang balai sidang tersebut masih digunakan untuk balai sidang keliling seminggu sekali dalam satu minggu.

Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 M² dan yang berdampingan dengan bangunan gedung yang lama. Dan pada bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16 M² yang terletak diantara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Kemudian pada Tahun Anggaran 2007 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja

modal rehabilitasi Gedung, karena tidak ada tempat maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama, dan ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 540 M², dan pada Tahun Anggaran 2008 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama dan ditempat tersebut dibangunlah Gedung kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 300 M². Pada Tahun 2009 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan Agama Kalianda serta jalan masuk kantor. Pada Tahun 2010 mendapat belanja modal untuk penimbunan halaman kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda, Lampung Selatan.⁶⁶

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kalianda, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

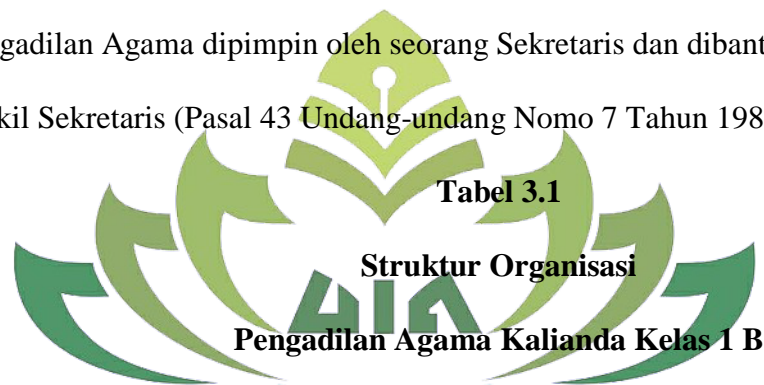
Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama adalah terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11

⁶⁶“Profil Pengadilan Agama Kalianda” (On-line), tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/html>. (5 September 2018)

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Panitera Pengadilan Agama sebagai pimpinan Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Panitera muda, beberapa orang Panitera pengganti, dan beberapa orang jurusita (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita pengganti (Pasal 38 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris (Pasal 43 Undang-undang Nomo 7 Tahun 1989).



No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Sartini, S. H., M. H.	Ketua
2.	Askonsri, S. Ag., M. H. I.	Wakil Ketua
3.	Ahamad Kholil R, S. Ag., M. H.	Hakim 1
4.	Warhan Latief, S. Ag., M. H.	Hakim 2
5.	Hj. Khoirunnisa, S. H. I., M. A.	Hakim 3
6.	H. Dede Andi, S. H. I., M. H.	Hakim 4
7.	Hj. Lia Auliyah, S. H. I., M. H.	Hakim 5
8.	Ahmad Hidayat, S. H. I., M. H.	Hakim 6
9.	Abdul Halim M S, Lc., M. Ec., M. H.	Hakim 7

10.	Nur Hidayat, S. Ag., M. A.	Hakim 8
11.	H. Martono, S. H. I., M. A.	Hakim 9
12.	H. Sarman, S. H.	Panitera
13.	Edi Laili, S. H., M. H.	Wakil Panitera
14.	Gunawan, S. H. I.	Sekretaris
15.	Susiana, S. H. I.	Panitera Pengganti
16.	Nurlaila, S. H. I.	Panitera Pengganti
17.	Dewi Oktavia, S. H.	Panitera Pengganti
18.	Suhendi, S. H.	Panitera Pengganti
19.	Taufik Hidayah, S. H. I., S. H., M. H	Panitera Pengganti
20.	Masroah, S. H. I.	Panitera Pengganti
21.	Nurul Huda, S. H. I.	Panitera Pengganti
22.	Shilvy Sagita, S. H.	Panitera Pengganti
23.	Syaiful Rohim, S. H.	Jurusita
24.	Febria Dewita, S. Kom.	Jurusita
25.	Hadani Robbi	Jurusita Pengganti
26.	Deni Efprian, S. H., M. H.	Panitera Muda Hukum
27.	Aldan, S. H.	Panitera Muda Gugatan
28.	Asmarikad, S. H., M. H.	Panitera Muda Permohonan
29.	Agung Noerdiansyah, S. T.	Kasubag Umum dan Keu.
30.	Hardini Tawangsari, S. Si., M. H.	Kasubag Perencanaan, IT ⁶⁷

⁶⁷“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda” (On-line) tersedia di:<http://www.pa-kalianda.go.id/html>. (5 September 2018).

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda

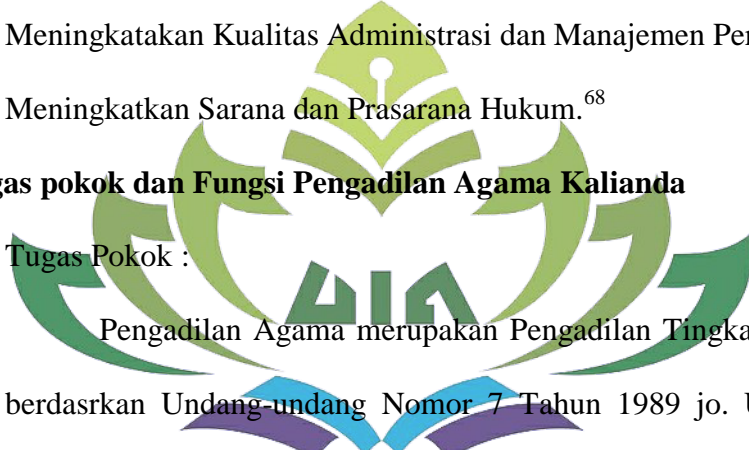
Visi Pengadilan Agama Kalianda adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Pengadilan Agama Kalianda yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum”.

Dalam mewujudkan visi diatas, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengadilan.
3. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.⁶⁸

D. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda

a. Tugas Pokok :



Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berdasarakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;

⁶⁸“Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kalianda” (On-line) tersedia di:<http://www.pa-kalianda.go.id/html>. (5 September 2018)

5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah dan;
9. Ekonomi Syari'ah (yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan Isbat Kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap Pasal 52A ini berbunyi “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal Tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama Mengeluarkan penetapan secara Nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu Salat. Di samping itu, penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada pengangkatan Anak menurut ketentuan Hukum Islam.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintahan di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.⁶⁹

E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda

Pengadilan Agama Kalianda wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, secara Astronomi kota Kalianda terletak antara 5° 15' sampai dengan 6° Lintang Selatan dan 105° 14' sampai dengan 105° 45' Bujur Timur, secara Administrasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Sedangkan areal wilayahnya lebih kurang 3.188,78 KM² atau 318.878 H² yang terdiri dari 27 Kecamatan, 432 Desa, dan 2.234 Dusun. Adapun jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk Tahun 2012 lebih kurang berjumlah 1.374.875 jiwa dan yang beragama Islam 96.84% sejumlah 1.299.735 jiwa, yang meliputi 2 (dua) Kabupaten sebagai berikut:

⁶⁹“Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda”(On-line), tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/.html>. (Rabu 5 September 2018).

a. Kabupaten Lampung Selatan

1. Kecamatan Kalianda Ibukota Kecamatan di Kalianda 24 Desa dan 3 Kelurahan.
2. Kecamatan Penengahan Ibukota Kecamatan di Pasuruan 22 Desa.
3. Kecamatan Palas Ibukota Kecamatan di Bangunan 21 Desa
4. Kecamatan Sidomulyo Ibukota Kecamatan di Sidorejo 15 Desa.
5. Kecamatan Katibung Ibukota Kecamatan di Tanjung Ratu 12 Desa.
6. Kecamatan Tanjung Bintang Ibukota Kecamatan di Jati Baru 16 Desa.
7. Kecamatan Natar Ibukota di Merak Batin 22 Desa.
8. Kecamatan Jati Agung Ibukota Kecamatan di Margo Agung 21 Desa.
9. Kecamatan Sragi Ibukota Kecamatan di Kuala Sekampung 10 Desa.
10. Kecamatan Ketapang Ibukota Kecamatan di Bangun Rejo 16 Desa.
11. Kecamatan Candipuro Ibukota Kecamatan di Titiwangi 14 Desa.
12. Kecamatan Merbau Mataram Ibukota Kecamatan di Merbau Mataram 15 Desa.
13. Kecamatan Rajabasa Ibukota Kecamatan di Bandung.



14. Kecamatan Tanjung Sari Ibukota Kecamatan di Kertosari 8 Desa.
15. Kecamatan Way Sulan Ibukota Kecamatan di Karang Pucung 8 Desa.
16. Kecamatan Way Panji Ibukota Kecamatan di Sidoharjo 5 Desa.
17. Kecamatan Bakauheni Ibukota Kecamatan di Hatta 6 Desa.

b. Kabupaten Pesawaran

1. Kecamatan Gedong Tataan Ibukota Kecamatan di Sukaraja 21 Desa.
2. Kecamatan Kedondong Ibukota Kecamatan di Kedondong 23 Desa.
3. Kecamatan Negeri Katon Ibukota Kecamatan di Negeri Katon 21 Desa.
4. Kecamatan Way Lima Ibukota Kecamatan di Batu Raja 17 Desa.
5. Kecamatan Padang Cermin Ibukota Kecamatan di Wates Way Ratai 22 Desa.
6. Kecamatan Punduh Pidada Ibukota Kecamatan di Bawang 21 Desa.
7. Kecamatan Tegineneng Ibukota Kecamatan di Trimulyo 16 Desa.
8. Kecamatan Marga Punduh Ibukota Kecamatan di Punduh 10 Desa.



F. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan pada Pengadilan Agama Kalianda

Selama bulan Agustus 2015 terdapat 21 Perkara yang masuk dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda dengan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang bervariasi. Berikut ini adalah tabel untuk melihat perkara yang masuk dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda pada bulan Agustus 2015

Tabel 3.2

**Daftar Perkara Yang Masuk Dan Telah di Putus Pada Pengadilan
Agama Kalianda Bulan Agustus 2015**

No	No. Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para pihak	Status Perkara	Lama proses
1.	0561/Pdt.G/2015/PA.Kla	03 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamakan	Putusan	168 Hari
2.	0587/Pdt.G/2015/PA.Kla	03 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamakan	Putusan	164 Hari
4.	0615/Pdt.G/2015/PA.Kla	05 Agustus 2015	Cerai Talak	Disamakan	Minutasi	204 Hari
5.	0619/Pdt.G/2015/PA.Kla	06 Agustus 2015	Cerai Talak	Disamakan	Putusan	161 Hari
6.	0624/Pdt.G/2015/PA.Kla	07 Agustus 2015	Cerai Talak	Disamakan	Minutasi	189 Hari
7.	0630/Pdt.G/2015/PA.Kla	10 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamakan	Putusan	164 Hari
8.	0640/Pdt.G/2015/PA.Kla	12 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamakan	Putusan	166 Hari
9.	0653/Pdt.G/2015/PA.Kla	14 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamakan	Putusan	160 Hari

10.	0657/Pdt.G/2 015/PA.Kla	18 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	149 Hari
11.	0659/Pdt.G/2 015/PA.Kla	18 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	162 Hari
12.	0664/Pdt.G/2 015/PA.Kla	19 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	161 Hari
13.	0665/Pdt.G/2 015/PA.Kla	19 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Minutasi	117 Hari
14.	0677/Pdt.G/2 015/PA.Kla	20 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Minutasi	237 Hari
15.	0678/Pdt.G/2 015/PA.Kla	21 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Pembuat an Akta Cerai	181 Hari
16.	0684/Pdt.G/2 015/PA.Kla	21 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	160 Hari
17.	0689/Pdt.G/2 015/PA.Kla	24 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	163 Hari
18.	0697/Pdt.G/2 015/PA.Kla	25 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Minutasi	177 Hari
19.	0700/Pdt.G/2 015/PA.Kla	25 Agustus 2016	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	149 Hari
20.	0705/Pdt.G/2 015/PA.Kla	26 Agustus 2015	Cerai Talak	Disamarkan	Putusan	147 Hari
21.	0719/Pdt.G/2 015/PA.Kla	28 Agustus 2015	Cerai Gugat	Disamarkan	Putusan	150 Hari ⁷⁰

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kalianda memakan waktu selama kurang lebih 5 bulan

⁷⁰“Daftar Riwaya Perkara Pengadilan Agama Kalianda bulan Agustus Tahun 2015” (On-line), tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/>. (6 September 2018).

(12 perkara). Ada juga beberapa perkara yang penyelesaian perkaranya cukup memakan waktu yang lama yaitu, 2 perkara selama kurang lebih 6 bulan dan 2 perkara juga dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Namun tidak sedikit juga perkara yang selesai dalam waktu yang singkat yaitu, ada 2 perkara selesai dalam waktu 3 bulan dan 2 perkara juga dalam waktu 4 bulan.

Dari rincian perkara diatas penulis mengambil beberapa sampel perkara untuk dibahas lebih, yaitu:

1. Perkara Nomor: 0657/Pdt.G/2015/PA.Kla. (Cerai Gugat)

Dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatannya pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan dalam register perkara Nomor: 905/Pdt.G/2015/PA.Kla. Kemudian penetapan sidang pertama dalam perkara tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Ketua Majelis mengabulkan permohonan dari penggugat. Proses persidangan berlangsung kurang lebih selama 5 bulan, dan secara resmi berakhir pada tanggal 07 Januari 2016.⁷¹

Berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dalam perkara ini biaya panjar yang harus dibebankan kepada penggugat yaitu, Rp. 496.000,00., Dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,00
- b. Biaya proses: Rp. 50.000,00

⁷¹Putusan Perkara Nomor: 905/Pdt.G/2015/PA.Kla.

- c. Panggilan Penggugat/Pemohon RD 1: Rp. 75.000,00
- d. Panggilan Tergugat/Termohon (2x): Rp. 85.000,00
- e. Panggilan Tergugat/Termohon (2x): Rp. 85.000,00
- f. Biaya Redaksi: Rp. 5.000,00
- g. Biaya Materai; Rp. 6.000,00
- h. PBT-A2 (Verstek): Rp. 85.000,00
- i. Pengembalian Sisa panjar: Rp. 75.000,00

Dari uraian diatas, proses penyelesaian perkara tersebut termasuk ke dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Walaupun proses penyelesaiannya lumayan memakan waktu yang cukup lama namun berdasarkan Mahkamah Agung dalam surat edaran no 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai perkara diminutasi.

2. Perkara Nomor: 0700/Pdt.G/2015/PA.Kla. (Ceraai Gugat)

Dalam perkara ini penggugat dalam suratnya tanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kalianda pada register Nomor: 0700/Pdt.G/2015/PA.Kla. Penetapan hari Sidang pertama pada perkara ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015. Perkara ini pun secara resmi telah selesai dengan Majelis Hakim membacakan hasil putusan pada tanggal 14 Januari 2016.⁷²

⁷²Putusan Perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Kla.

Adapun biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat yaitu, Rp. 596.000,00., dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,00
- b. Biaya Proses: Rp. 50.000,00
- c. Panggilan penggugat RD 3: Rp. 125.000,00
- d. Panggilan Tergugat (2x): Rp. 85.000,00
- e. Panggilan Tergugat (2x): Rp. 85.000,00
- f. Biaya Redaksi: Rp. 5.000
- g. Biaya Materai: Rp. 6.000,00
- h. PBT-A2 (Putusan Verstek: Rp. 85.000,00
- i. Pengembalian sisa panjar: Rp. 125.000,00

Dari uraian diatas, proses penyelesaian perkara tersebut sudah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal itu bisa dilihat dari proses pemeriksaan hingga keluarnya surat putusan yang berlangsung selama 5 bulan, dan biaya panjar perkara pun tidak terlalu besar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perkara Nomor: 0697/Pdt.G/2015/PA.Kla. (cerai talak)

Tentang duduk perkaranya bahwa pemohon dalam suratnya tertanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan dengan perkara cerai talak, yang telah terdaftar dengan register nomor: 0500/Pdt.G/2015/PA.Kla. Dalam perkara ini penetapan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015.

Mengenai waktu selesainya perkara ini adalah terhitung dari penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Agustus 2015 sampai perkara ini diputus tanggal 11 Februari 2016, jadi lamanya perkara ini adalah kurang lebih 6 bulan. Jadi perkara tersebut bisa dikategorikan lama. Mengingat menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama yaitu, 5 bulan.⁷³

Sedangkan mengenai rincian biaya panjar perkara yang dibebankan kepada penggugat adalah Rp. 841.000,00., dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,00
- b. Biaya Proses: Rp. 50.000,00
- c. Panggilan penggugat RD 4: Rp. 150.000,00
- d. Panggilan penggugat RD 4: Rp. 150.000,00
- e. Panggilan Tergugat (2x): Rp. 85.000,00
- f. Panggilan Tergugat (2x): Rp. 85.000,00
- g. Biaya Redaksi: Rp. 5.000
- h. Biaya Materai: Rp. 6.000,00
- i. PBT-A2 (Putusan Verstek: Rp. 85.000,00
- j. Pengembalian sisa panjar: Rp. 195.000,00

⁷³Putusan Perkara Nomor: 0500/Pdt.G/2015PA.Kla.

Adapun dalam menjalankan tugasnya yang menjadi faktor pendorong serta faktor penghambat dari pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda, yaitu:

a) Faktor Pendorong

- 1) Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim, faktor yang mendorong pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu harus di mulai dari lingkungan aparaturnya Pengadilan Agama Kalianda itu sendiri, Hal ini telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kalianda dengan mengikuti ketentuan Hukum beracara yang ada, dan juga pihak Pengadilan Agama Kalianda juga telah melaksanakan sidang keliling ke kecamatan-kecamatan yg ada di Kabupaten Lampung Selatan, semua ini dilakukan demi terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷⁴
- 2) Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Kalianda panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kalianda untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah dilakukam dengan semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan bagi masyarakat yang ingin berperkara hal ini dilakukan agar dapat memudahkan masyarakat awam untuk melakukan pendaftaran perkara. Pihak

⁷⁴Ahmad Hidayat, Hakim Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 27 September 2018

pengadilan juga sudah bekerja sesuai dengan SOP pengadilan Agama Kalianda.⁷⁵

Apabila ada pencari keadilan yang tidak mampu untuk membayar biaya panjar perkara, maka dalam hal ini pihak Pengadilan akan mengarahkan untuk mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma).

- 3) Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Advokat/pengacara menerangkan bahwa Pengadilan Agama Kalianda sudah cukup baik dalam upaya menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik pegawai maupun Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kalianda sudah memberikan pelayanan secara maksimal hal ini tentu sangat membantu dari pihak yang berperkara.⁷⁶

- 4) Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan orang yang berperkara menerangkan bahwa pelayanan yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Kalianda sudah cukup baik, contohnya dalam hal ini apabila ada masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya namun masih bingung bagaimana caranya membuat surat gugatan maka pihak Pengadilan akan mengarahkan pihak yang ingin berperkara tersebut ke POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk diberikan bantuan dan tata cara yang baik dan benar untuk membuat

⁷⁵ Sarman, Panitera Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 27 September 2018

⁷⁶ Ahmad Zaenuri, Advokat/Pengacara, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

surat gugatan tersebut, hal ini tentu sangat membantu jalanya proses persidangan agar dapat terlaksana dengan cepat dan tidak berbelit belit karena apabila surat gugatan yang telah dibuat tersebut benar maka perkara tersebut bisa langsung dapat diproses dan proses persidanganpun dapat berjalan dengan lancar. Hal ini tentu sangat sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷⁷

- 5) Menurut salah seorang saksi menerangkan bahwa Hakim yang bertugas selama persidangan cukup baik, mereka selalu mengupayakan upaya mediasi terlebih dahulu dalam kasus perceraian, namun apabila tak kunjung ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka proses perceraian pun akan langsung dilaksanakan tanpa perlu menunda-nunda sehingga perkara pun selesai sesuai dengan yang sudah dijadwalkan.⁷⁸

- 6) Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda menerangkan bahwa Jurusita/Jurusita dalam tugasnya telah berupaya melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk menyampaikan surat panggilan resmi kepada pihak yang berperkara, walaupun kadang terkendala dari jarak yang ditempuh ataupun pihak yang ingin ditemui tidak berada ditempatnya. Namun Jurusita/Jurusita pengganti tetap berupaya agar

⁷⁷ Abdul Somad, Penggugat, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

⁷⁸ Salihin, Saksi, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

surat panggilan tersebut dapat sampai kepada pihak yg berperkara hal ini agar perkara tersebut tidak berlarut-larut dan tentu saja tidak membuat biaya perkara tidak semakin besar.⁷⁹

b) Faktor Penghambat

- 1) Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kalianda, salah satu kendala yaitu dalam pemanggilan para pihak, apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan maka berpengaruh pada proses persidangan yang akan memakan waktu lebih lama.
- 2) Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu panitera, hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan asas ini yaitu, masih maraknya masyarakat yang menggunakan calo. Hal ini didasarkan pada masyarakat itu sendiri yang kurang begitu memahami proses pendaftaran dalam berperkara. Tidak hanya itu di dalam proses persidangan terkadang, ada salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tidak hadir, meskipun sudah ada panggilan resmi dari Pengadilan Agama.⁸⁰
- 3) Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Jurusita, kendala atau hambatan yang sering dialami yaitu sulitnya untuk menjangkau atau menemui pihak tergugat di alamatnya. Hal ini terjadi karena alamat yang ditujukan kepada pihak tergugat

⁷⁹ Hadani Robbi, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

⁸⁰ Nurlaila, Panitera Pengganti Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

terkadang tidak sesuai ataupun yang bersangkutan sendiri tidak berada di kediamannya sehingga proses pemanggilan pun cukup memakan waktu yang lama tentu saja mengeluarkan biaya yang cukup besar.⁸¹

- 4) Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Pengacara/Advokat salah satu faktor yang menghambat yaitu apabila di dalam suatu proses persidangan bila perkara yang telah dimasukan dalam pemeriksaan ternyata ada perkembangan baru dalam kasus tersebut maka pemeriksaan baru tersebut akan memakan waktu yang lama, proses yang mengharuskan waktu yang lama sehingga hal ini berpengaruh terhadap biaya panjar.⁸²

- 5) Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang berperkara, kendala yang sering dihadapi yaitu: pertama, Dalam pengajuan perkara itu sendiri banyak masyarakat pencari keadilan yang masih awam ketika hendak mengajukan perkara mereka tidak membawa persyaratan yang di wajib dibawa. Kebanyakan dari mereka hanya datang dengan tangan kosong tanpa membawa dokumen yang diperlukan guna mengajukan pendaftaran. faktor yang sering terjadi yaitu tergugat yang telah diundang atau dipanggil telah sengaja untuk tidak hadir dengan alasan berbenturan dengan pekerjaan yang tidak bisa

⁸¹ Syaiful Rohim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

⁸² Riko Andrean, Advokat/Pengacara, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

ditinggalakan. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap proses lama nya persidangan juga dari segi biaya yang harus dikeluarkan. Ketiga, kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri bagaimana prosedur untuk mengajukan pendaftaran perkara sehingga, kebanyakan masyarakat yang kurang paham menggunakan jasa calo yang tentu saja dapat merugikan masyarakat itu sendiri..⁸³

- 6) Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan saksi, terkadang dari mereka justru tidak atau kurang mengetahui tentang masalah yang terjadi menurutnya, mereka datang dan dijadikan saksi karena di mintai tolong oleh pihak yang berperkara. Hal ini tentu dapat mengganggu jalanya persidangan karena akan memakan waktu lebih lama lagi untuk penyelesaiannya, Namun tentu tidak semuanya seperti itu masih banyak saksi yang berkompeten yang memang benar-benar tahu akar permasalahan dari pihak yang berperkara..⁸⁴

⁸³ Mursinah, Penggugat, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

⁸⁴ Handoko, Saksi, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018

BAB IV

ANALISI PENELITIAN

A. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kalianda.

Dalam penelitian yang telah Penulis lakukan mengenai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda wujud dari penerapan asas tersebut peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda bahwa faktor yang mendorong pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu harus di mulai dari lingkungan aparatur Pengadilan Agama Kalianda itu sendiri. Hal ini telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kalianda dengan mengikuti ketentuan Hukum beracara yang ada.

Dalam pelaksanaan asas peradilan yang sederhana Hakim pun dalam melaksanakan proses persidangan sudah sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh pihak yang berperkara. Panitera Pengadilan Agama Kalianda panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kalianda untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah dilakukam dengan semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan bagi masyarakat yang ingin berperkara hal ini dilakukan agar dapat memudahkan masyarakat awam untuk melakukan pendaftaran perkara.

Apabila ada pencari keadilan yang tidak mampu untuk membayar biaya panjar perkara, maka dalam hal ini pihak Pengadilan akan mengarahkan untuk mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Dari keterangan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dalam hal ini sangat membantu, Hakim yang bertugas di dalam proses persidangan sudah bekerja dengan baik sehingga mereka dapat mudah mengerti apa yang dikatakan oleh hakim, begitupun staff kepegawaian Pengadilan Agama Kalianda mereka senantiasa membantu dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk membantu mereka bagaimana cara melakukan pendaftaran atau hal-hal lain yang berhubungan dengan proses berperkara di Pengadilan Agama Kalianda.

Namun tetap saja masih ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti Calo, yang tentu saja harus lebih diawasi oleh pihak Pengadilan Agama Kalianda agar tidak masyarakat pencari keadilan yang dirugikan oleh oknum-oknum tersebut.

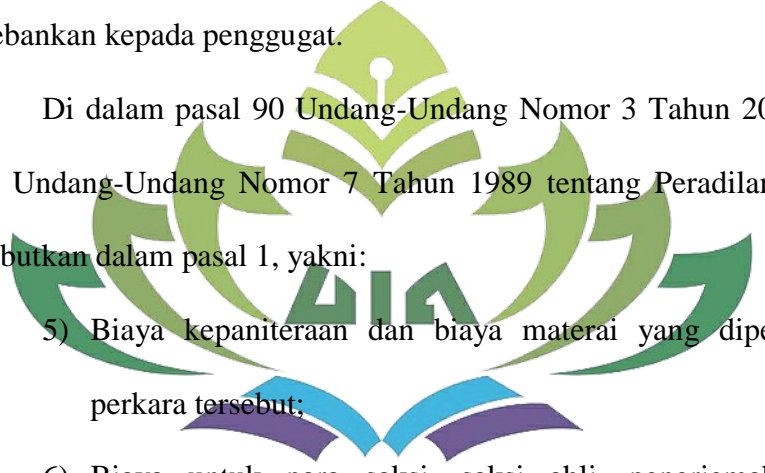
Mengenai pelaksanaan cepat di Pengadilan Agama Kalianda, cepatnya penyelesaian suatu perkara sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, didalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa perkara di tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan. Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap proses penyelesaian perkara selama bulan Agustus 2015 di Pengadilan Agama Kalianda ada 21 perkara yang masuk dan telah diputus, dengan rata-rata penyelesaiannya memakan waktu kurang lebih 5 bulan (12

perkara) hal ini masih sesuai aturan yang terdapat Surat Edaran tersebut, walaupun masih ada penyelesaian perkara yang lewat dari 5 bulan.

Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu dari pihak yang berperkara itu sendiri ataupun faktor non teknis lainnya seperti masih maraknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Namun, dari hasil penelitian penulis terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kalianda ini faktor dari pihak yang berperkara itu sendiri lah yang membuat penyelesaian perkara menjadi lama. Pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak hadir dalam persidangan tentu hal ini mempengaruhi jalannya persidangan, persidangan yang harusnya berjalan sesuai jadwal yang ditentukan jadi harus ditunda karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan, belum lagi terkadang kendala seperti pihak tergugat yang tidak ada pada kediaman atau alamatnya sehingga terkadang jurusita kesulitan untuk memberi surat panggilan dari Pengadilan Agama Kalianda. Bahkan, walaupun sudah ada panggilan resmi mereka sengaja tidak datang dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentu saja hal-hal yang seperti inilah yang harus dihindari karena dapat mengganggu jalanya persidangan, karena pada dasarnya apabila para pihak yang berperkara mengikuti aturan dan proses beracara sesuai ketentuan yang telah diterapkan Pengadilan Agama Kalianda tentulah jalannya persidangan akan terlaksana dengan baik dan berlangsung dengan cepat dan tepat tanpa mengurangi nilai dan kualitas dari putusan tersebut.

Mengenai pelaksanaan “biaya ringan” di Pengadilan Agama Kalianda, tentang segala aturan mengenai biaya panjar perkara sudah tertera di dalam “Surat Keterangan Biaya Panjar Perkara Pengadilan Agama Kalianda” yang bisa dilihat di dalam lampiran skripsi ini. Dalam kaitannya dengan penelitian yang telah penulis lakukan dari beberapa perkara, Pengadilan Agama Kalianda sudah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai biaya perkara sudah diatur didalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa semua biaya dibebankan kepada penggugat.

Di dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga disebutkan dalam pasal 1, yakni:

- 
- 5) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
 - 6) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
 - 7) Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
 - 8) Biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

Jadi, mengenai biaya panjar perkara Pengadilan Agama Kalianda telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pihak pengadilan Agama

Kalianda juga berusaha setransparan mungkin agar pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan, pihak yang berperkara dapat melihat atau menanyakan langsung untuk apa saja biaya yang dikeluarkan tersebut, apabila ada sisa uang dari biaya panjar yang dibayar maka Pengadilan Agama Kalianda akan mengembalikan sisa biaya panjar tersebut. Pengadilan Agama Kalianda juga menghimbau kepada masyarakat pencari keadilan agar melapor apabila ada oknum-oknum baik dari luar atau lingkungan Pengadilan itu sendiri apabila ada yang meminta biaya lebih karena hal ini tidak termasuk didalam peraturan dan termasuk kedalam Pungli (Pungutan Liar).

Meskipun pada prakteknya masih saja ada beberapa masyarakat yang menggunakan jasa Calo maka dari itu Pengadilan Agama Kalianda sekali lagi mengajak dan menghimbau kepada masyarakat pencari keadilan untuk bersama-sama mengawal jalannya peraturan yang berlaku.

Dari keterangan diatas, telah diterangkan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda telah terlaksana, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan kendala baik dari proses penyelesaian perkara yang belum sesuai dengan asas tersebut, ataupun pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti Calo, ataupun Pungli. Tentu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan terlaksana dengan baik apabila pihak Pengadilan Agama Kalianda dan pihak-pihak yang berperkara saling membantu dan mengawal jalannya asas tersebut demi terciptanya Peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat dari pendekatan siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan). Walaupun didalam Al-Qur'an sendiri tidak disinggung secara jelas mengenai asas peradilan ini, Namun hal tersebut dapat di akomodir dan di dukung oleh dalil *Maslahah Mursalah* yaitu, Kemaslahatan yang belum tertulis dalam Nas dan Ijma' serta tidak ditemukannya Nas dan Ijma' yang melarangnya.

Sementara itu, Al-Ghazali merumuskan *Maslahah Mursalah* yaitu, apa-apa (*Mursalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk Nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya⁸⁵.

Abdul Whab Khallaf merumuskan *Maslahah Mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau membatalkannya⁸⁶.

Penempatan *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode instinbat hukum, menjadikan hukum islam itu luwes, dan keuniversalan hukum islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didominasi oleh ego dan hawa nafsu semata. Al-Syatibi telah

⁸⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, (Beirut: Dar-al-Fikr,tt.), h. 286.

⁸⁶ Wahhab Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1986), h. 757.

menetapkan persyaratan sebagai uji materiil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intens legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasar asumsi dan spekulasi semata.
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.⁸⁷

Dalam sejarah Peradilan Islam ketika Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat mendapatkan permasalahan maka mereka akan langsung menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan ajaran Islam tanpa memberatkan kedua pihak yang sedang berperkara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisaa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Q.S. An-Nisaa:65)

Agama Islam mengajarkan secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Apabila terdapat perkara diantara Ummat

⁸⁷ Mohammad Rusfi, “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-ADALAH* Vol. XII No. 1, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 64. (On-line), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (7 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

maka harus langsung diselesaikan tanpa harus menunda-nunda dan diselesaikan dengan seadil-adilnya Tanpa merugikan salah satu pihak.

Mengenai biaya yang harus dibayar oleh penggugat Agama Islam telah mengajarkan untuk tidak mengambil harta yang bukan hak nya. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kalianda tidak boleh mengambil biaya lebih atau (Pungli) terhadap biaya panjar perkara yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat (188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*⁸⁸
(Q.S. Al-Baqarah:188)

Berdasarkan beberapa uraian diatas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Fiqih Siyash dan juga ajaran Islam serta dengan dalil *Maslahah Mursalah*.

⁸⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda sebenarnya telah sesuai dengan asas tersebut karena Pengadilan Agama Kalianda sudah bekerja dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Peradilan Indonesia, Namun tetap saja masih sedikit terjadi kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda disebabkan dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ada pula faktor lain seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan contohnya seperti, serta faktor non-teknis lainnya.
2. Pandangan fiqh Siyasah terhadap asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan dalil *Maslahah Mursalah* yaitu, sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode instinbat hukum, menjadikan hukum islam itu luwes, dan keuniversalan hukum islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Itu

semua bertujuan untuk Kemaslahatan Ummat semata, karena apabila asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dengan baik, tentulah masyarakat pencari keadilan akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang pelaksanaan asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kalianda serta melakukan analisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari pihak Pengadilan Agama Kalianda harus tetap bekerja sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga para pegawai Pengadilan tetap harus bekerja sesuai SOP yang berlaku serta memberikan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan. Pihak Pengadilan Agama juga diharapkan lebih gencar dalam memberikan penyuluhan hukum dan bekerjasama dengan Instansi yang ada agar timbul kesadaran Hukum serta taat dan patuh terhadap Hukum demi terwujudnya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Bagi pihak yang berperkara diharapkan dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang ada selama proses persidangan di Pengadilan Agama Kalianda. Karena peran pihak yang berperkara juga turut membantu dalam pelaksanaan asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hajsmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Beirut: Dar-al-Fikr, tt.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.
- Daftar Riwaya Perkara Pengadilan Agama Kalianda bulan Agustus Tahun 2015” (On-line), tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/>. (6 September 2018).
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. 2011.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mohammad Rusfi, “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”,
Jurnal Al-‘ADALAH Vol. XII No. 1, Bandar Lampung: Fakultas
Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, . (On-line), tersedia di:
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>. (7 Desember
2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM,
Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002.

Penjelasan pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan kehakiman.

Penjelasan Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Philip K. Hitty, *History Of Arabs: From The Earlist Time to The Present*, New
York, Palgrave Macmilan, 2002.

Profil Pengadilan Agama Kalianda” (On-line), tersedia di: [http://www.pa-](http://www.pa-kalianda.go.id/html)
[kalianda.go.id/html](http://www.pa-kalianda.go.id/html). (5 September 2018)

Putusan Perkara Nomor: 905/Pdt.G/2015/PA.Kla.

Putusan Perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Kla

Putusan Perkara Nomor: 0500/Pdt.G/2015/PA.Kla.

Rimdan, *kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 1992.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda” (On-line) tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/html>. (5 September 2018).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi keempat), Yogyakarta: Liberty, 1993.

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

Suyuti J. Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prenada, 1997.

Syaiful Rohim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, Kalianda Lampung Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2018.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda” (On-line), tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/html>. (Rabu 5 September 2018).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU PA, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2004.

Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kalianda” (On-line) tersedia di: <http://www.pa-kalianda.go.id/html>. (5 September 2018)

Wahyudi Tri Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Wahhab Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1986

Zeni Yusarli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

